

**PERAN UPT DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERMUKIMAN DI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR**

Hafid Kurrachman Nur Firdaus¹, Radjikan²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(hafidkurrachman@gmail.com, radjikan@untag-sby.ac.id)

ABSTRAK

Kegiatan magang di Dinas Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan ke dalam praktik nyata. Selama magang, mahasiswa diberikan fleksibilitas dan kepercayaan untuk melakukan tugas-tugas seperti Penyusunan dan pembuatan FlowChart SOP pengosongan hunian untuk penertiban Kawasan rusunawa dan Penyusunan Surat Perjanjian dan Surat Serah Terima Sewa Menyewa Rumah Susun. Kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh instansi memberikan pengalaman praktis yang berharga, namun terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan akses informasi dan kendala komunikasi yang membatasi pemahaman menyeluruh tentang proses administrasi. Meskipun demikian, pengalaman ini tetap memberikan wawasan penting dan keterampilan yang relevan dalam bidang bagian UPT dalam Pengelolaan dan Pelayanan Permukiman, mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja dengan lebih baik. Pengalaman magang ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk terus belajar dan berkontribusi secara positif dalam proses administrasi.

Kata Kunci : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Pelayanan Publik

ABSTRACT

Internship activities at the East Java Provincial Office provide valuable opportunities for students to apply the theories learned in lectures into real practice. During the internship, students are given the flexibility and trust to carry out tasks such as the preparation and creation of SOP Flowcharts for vacating occupancy for the order of the rusunawa area and the preparation of Agreement Letters and Handover Letters for Renting Flats. The trust and responsibility given by the agency provides valuable practical experience, but there are some obstacles such as limited access to information and communication constraints that limit a thorough understanding of administrative processes. Nonetheless, this experience still provides important insights and relevant skills in the field of UPT's section in Settlement Management and Services, better preparing students to face challenges in the world of work. This internship experience is expected to motivate students to continue learning and contribute positively to the administrative process.

Keywords : *East Java Provincial Public Housing, Settlement and Human Settlement Agency, Public Service*

PENDAHULUAN

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan dan permukiman dapat dilakukan secara efisien dan efektif, serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Adanya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya di institusi pendidikan tinggi juga penting karena memberi mahasiswa kesempatan untuk menggunakan pengetahuan yang mereka pelajari di kelas. Melalui program magang, mahasiswa dapat memperluas pengetahuan mereka dan mendapatkan pengalaman praktis. Kegiatan yang diadakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam kegiatan ini.

Perumahan permukiman merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan daerah yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, tantangan dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat. Dalam konteks ini, Unit Pelaksana Teknis (UPT) berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan perumahan permukiman, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang layak.

Penyediaan hunian layak dan pengelolaan kawasan permukiman yang teratur merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya, menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang berperan penting dalam mendukung kebijakan ini adalah UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman.

UPT berfungsi sebagai perpanjangan tangan dinas dalam mengelola, mengawasi, dan memberikan pelayanan terkait fasilitas perumahan dan permukiman, seperti rumah susun, kawasan relokasi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Dengan tugas tersebut, UPT diharapkan dapat memastikan keberlangsungan pemanfaatan fasilitas perumahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat penerima manfaat.

Namun, dalam pelaksanaannya, UPT menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, kompleksitas kebutuhan masyarakat, hingga dinamika kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, memahami peran UPT dalam proses pengelolaan dan pelayanan perumahan permukiman menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan dasar untuk meningkatkan efektivitas pelayanan di masa depan.

Selama melaksanakan kegiatan magang di UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman, saya mempelajari berbagai kegiatan yang dilakukan, mulai dari pengelolaan rumah susun, penanganan fasilitas umum dan sosial, hingga pelayanan terhadap penghuni. UPT berperan penting sebagai pelaksana teknis di lapangan, memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan fasilitas perumahan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Dalam demikian, artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai peran UPT dalam pengelolaan dan pelayanan perumahan permukiman di Provinsi Jawa Timur, termasuk tantangan yang dihadapi dan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas layanan. Melalui

pemahaman yang lebih mendalam tentang peran UPT, diharapkan dapat ditemukan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi isu-isu perumahan di daerah ini.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Magang yang dilakukan oleh penulis di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mulai tanggal 30 Januari 2025 s/d 26 Maret 2025 adalah kesempatan berharga yang memungkinkan penulis untuk menerapkan teori dan praktik yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam situasi nyata. Dalam konteks ini, kegiatan magang bukan hanya sebagai sarana untuk memahami bagaimana administrasi dilakukan di sektor publik, tetapi juga sebagai langkah untuk mengintegrasikan pengetahuan akademis dengan praktik lapangan yang relevan dengan peminatan penulis.

Sebagai bagian dari program magang, penulis diberikan tanggungjawab di UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mahasiswa melakukan observasi lapangan dengan mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan dan pelayanan fasilitas perumahan, baik di kantor UPT maupun di lokasi seperti rumah susun dan kawasan permukiman binaan. Kedua, mahasiswa melakukan wawancara dan diskusi dengan pegawai UPT untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai tugas, tanggung jawab, prosedur pelayanan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, studi dokumen juga dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen pendukung seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan kegiatan, serta data pengelolaan yang tersedia di UPT, untuk memahami sistem kerja secara tertulis. Mahasiswa juga berpartisipasi aktif dalam beberapa kegiatan operasional, seperti membantu administrasi pelayanan penghuni rumah susun. Seluruh pengalaman tersebut kemudian dijadikan sebagai bentuk evaluasi dan refleksi atas peran UPT dalam pengelolaan dan pelayanan perumahan permukiman di Provinsi Jawa Timur.

HASIL & PEMBAHASAN

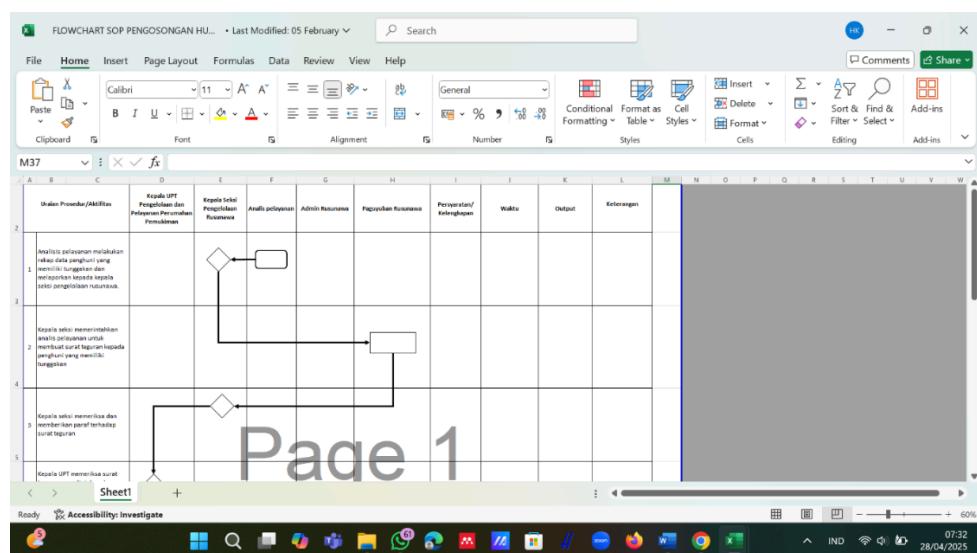
Kegiatan magang di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur memberikan sejumlah keunggulan yang signifikan bagi mahasiswa. Salah satu keunggulan utama yang dirasakan selama magang adalah fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas. Fleksibilitas ini memungkinkan mahasiswa untuk menyesuaikan waktu dan metode kerja mereka dengan kebutuhan dan keadaan yang ada. Dengan fleksibilitas ini, mahasiswa dapat mengatur dan menyeimbangkan antara tuntutan akademis dan tanggung jawab magang, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif. Selain fleksibilitas, mahasiswa magang juga diberikan kepercayaan untuk melakukan Penyusunan dan pembuatan FlowChart SOP pengosongan hunian untuk penertiban Kawasan rusunawa dan Menyusun surat perjanjian sewa menyewa Rumah Susun Sederhana yang sebelumnya sudah di cetak. Kepercayaan ini mencerminkan tingkat kepercayaan instansi terhadap kemampuan dan integritas mahasiswa dalam mengelola informasi yang sensitif dan penting. Menyusun surat perjanjian sewa menyewa Rumah Susun Sederhana yang sebelumnya sudah di cetak dan Penyusunan dan pembuatan FlowChart SOP pengosongan hunian rusunawa dalam Excel yang digunakan untuk penertiban Kawasan rusunawa memberikan ini tidak hanya memberikan pengalaman yang praktis dalam proses administrasi tetapi juga meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa dalam menggunakan atau mengoperasikan software yang merupakan komponen penting dalam proses pelayanan administrasi.

Pembina dari pihak magang juga memberikan kepercayaan penuh kepada mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya untuk menjalankan Penyusunan Surat Perjanjian dan Surat Serah Terima Sewa Menyewa Rumah Susun. Kepercayaan ini memberikan dorongan motivasi dan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada mahasiswa. Dengan diberikan tanggung jawab ini, mahasiswa dapat merasakan bagaimana bekerja secara profesional di lingkungan yang menuntut keakuratan dan ketelitian tinggi. Fasilitas yang disediakan oleh instansi, seperti komputer untuk proses input data dan pengecekan dokumen, juga mendukung kegiatan magang ini, memungkinkan mahasiswa untuk bekerja dengan alat yang memadai dan relevan dengan kebutuhan tugas mereka.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) berperan penting dalam mengelola dan memberikan layanan permukiman kepada masyarakat dengan berlandaskan teori manajemen pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, UPT berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan program bantuan perumahan yang tepat sasaran. UPT dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta menjalankan prosedur operasional sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Selain itu, kinerja UPT harus diukur berdasarkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat, seperti penurunan jumlah permukiman kumuh atau peningkatan akses terhadap rumah layak huni. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting, di mana UPT wajib melaporkan hasil kerja dan melakukan evaluasi berkala. Pelibatan masyarakat juga menjadi prinsip utama, sehingga dalam setiap program, UPT mendorong partisipasi warga sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Untuk mendukung semua ini, pegawai UPT perlu memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi agar mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas.

Pengalaman magang ini memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan teknis dalam analisis data, mahasiswa dapat langsung teori yang telah dipelajari selama masa pembelajaran di perkuliahan seperti manajemen pelayanan publik. Keunggulan ini memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kompetensi mahasiswa di bidang analisis data dan mempersiapkan mereka untuk tantangan profesional di masa depan.



Gambar 1. Penyusunan dan pembuatan FlowChart SOP pengosongan hunian untuk penertiban Kawasan rusunawa



Gambar 2. Menyusun surat perjanjian sewa menyewa Rumah Susun Sederhana yang sebelumnya sudah di cetak.

TEORI PENDUKUNG

Teori kinerja organisasi publik dapat digunakan untuk mempelajari peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam manajemen dan pelayanan permukiman. Menurut Ratminto dan Atik (2007), lima indikator utama digunakan untuk mengukur kinerja organisasi pemerintah. Ini adalah keadilan, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan kepuasan. Teori ini sangat relevan untuk menilai kinerja UPT karena lembaga ini adalah pusat implementasi kebijakan perumahan dan permukiman. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zakariya (2022) tentang UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan di Jawa Barat, teori ini digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan Apartemen Transit. Hasilnya menunjukkan bahwa peran UPT sangat strategis dalam mengoptimalkan layanan permukiman yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, teori desentralisasi dan otonomi daerah sangat penting untuk memahami fungsi UPT. Teori-teori ini memberikan pemerintah daerah, termasuk UPT, kewenangan untuk mengelola pelayanan publik secara lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, UPT berfungsi sebagai perpanjangan tangan dinas di tingkat tapak yang memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan UPT memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan publik secara lebih responsif dan sesuai.

Teori pemberdayaan masyarakat adalah teori lain yang mendukung peran UPT dalam pengelolaan permukiman. Pendekatan ini melihat masyarakat sebagai bukan hanya objek pembangunan tetapi juga orang yang aktif berpartisipasi dalam pengelolaan permukiman. Seperti yang ditunjukkan oleh kegiatan UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan dan Permukiman Dinas PRKP dan Cipta Karya Jawa Timur, UPT memiliki peran strategis sebagai

fasilitator dalam proses pemberdayaan ini. UPT juga meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup warga melalui pelatihan keterampilan kepada penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) (Harian Bangsa, 2020). Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Ir. Nany Yuliastuti, MSP dari Universitas Diponegoro, pembangunan permukiman yang layak huni harus mempertimbangkan kearifan lokal dan menggabungkan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebagai pelaksana teknis, UPT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program permukiman mengikuti prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, peran UPT tidak hanya administratif, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan dalam mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, layak, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan magang di bidang UPT dalam Pengelolaan dan Pelayanan Permukiman di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur memberikan sejumlah keunggulan penting bagi mahasiswa, termasuk sesaat dalam pelaksanaan tugas yang memungkinkan mereka menyesuaikan waktu dan metode kerja sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini membantu mahasiswa dalam menyeimbangkan tuntutan akademis dan tanggung jawab magang, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Selain itu, kepercayaan yang diberikan oleh instansi terhadap mahasiswa dalam mengelola informasi sensitif yang mencerminkan integritas dan kemampuan mereka, sekaligus meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab. Pengalaman ini juga memperkaya keterampilan teknis mahasiswa dalam analisis data, yang relevan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan. Dengan demikian, magang ini berkontribusi pada peningkatan kompetensi mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk tantangan profesional di masa depan.

Selama menjalani magang, saya mengamati bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki peran yang signifikan dalam mendukung operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, terutama dalam hal pengelolaan dan pelayanan permukiman. UPT menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan di lapangan, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan memastikan berbagai aspek permukiman berjalan sesuai rencana. Namun, efektivitas peran UPT sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, koordinasi antar sektor, serta kemampuan dalam beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah.

Untuk mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pengelolaan dan pelayanan permukiman di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, beberapa langkah dapat dipertimbangkan. Pertama, penting untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu melalui program magang yang lebih terstruktur, sehingga UPT dapat memperoleh perspektif baru dan ide-ide inovatif. Kedua, kegiatan sosialisasi terkait program dan layanan permukiman perlu diintensifkan dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk platform digital, agar informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Ketiga, pengembangan atau optimalisasi sistem informasi yang terintegrasi antar UPT dan dinas terkait akan mempermudah akses data dan mempercepat proses pelayanan. Keempat, selain pelatihan teknis, peningkatan kemampuan *soft skills* petugas UPT, seperti komunikasi dan pelayanan pelanggan, juga krusial untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan masyarakat. Terakhir, memberikan ruang yang lebih besar bagi inisiatif lokal dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program permukiman yang ditangani UPT akan meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, K. N. W., & Manggalou, S. (2024). PERAN DPRKPCK PROVINSI JATIM DALAM PENGEMBANGAN FASILITAS PENUNJANG PEMANDIAN AIR PANAS CANGAR. *Journal Publicuho*, 7(4), 2449-2463. <https://dprkpck.jatimprov.go.id/>
- Ananda, N. T., & Retnani, E. D. (2024). PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PERSPEKTIF VALUE FOR MONEY. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(8).
- Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro. (2022, Agustus 30). *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni – Peran Tenaga Ahli dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro*. <https://pwk.ft.undip.ac.id/id/perencanaan-dan-pengembangan-perumahan-dan-permuki-man-yang-layak-huni-peran-tenaga-ahli-dari-departemen-perencanaan-wilayah-dan-kota-universitas-diponegoro>
- Safiradewi, A. S. dan I. (2018). ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD MENGENAI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU
- Ratminto, & Atik, S. (2007). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safiradewi, A. S. dan I. (2018). ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD MENGENAI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU
- Harian Bangsa. (2020, Mei 7). *UPT Pengelolaan dan PPP Dinas PRKP & Cipta Karya Jatim Berdayakan Penghuni Rusunawa, hingga Layanan Laboratorium Pengujian*. <https://www.harianbangsa.net/upt-pengelolaan-dan-ppp-dinas-prkp-cipta-karya-jatim-berdayakan-penghuni-rusunawa-hingga-layanan-laboratorium-pengujian>
- Mamangkey, M., Liando, D., & Kimbal, M. (2019). Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–11.
- Zakariya, M. F. R. (2022). Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat dalam Pengelolaan Apartemen Transit di Provinsi Jawa Barat [Skripsi, Universitas Padjadjaran]. Universitas Padjadjaran Repository. <https://repository.unpad.ac.id/items/46fb700f-cfcf-4d81-b44f-f906ad05ec3b>